

## PELAKSANAAN PEMOLISIAN DI KOMPLEKS PERMATA CENGKARENG

Dwi Arie Wibowo <sup>1</sup>

*dwiariewibowo@gmail.com*

### Abstract

*Kompleks Permata or so-called Kampung Ambon is well known as a drugs related place. There was tending violent crime also presence of cock-fight gambling. On March 2009, there were build a police station right in the middle of Kompleks Permata. This research provides a description about policing implementation in Kompleks Permata. Researcher applies qualitative approach, quasi-experimental methods with before and after design. There are three indicators which researcher utilizes in purpose to compare policing in time before and after the police station have been built; (1) society partnership, (2) crime prevention, (3) problem solving. This research discover that there are no significant difference in policing between before and after time the police station have been built. Here is an advice related to policing implementation problems in Kompleks Permata, there is should be held an effective community development in order to solves existing problems together.*

*Keywords: Policing, police, Kampung Ambon/Kompleks Permata.*

Polisi dapat dikatakan sebagai cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo dalam Dwilaksono, 2009). Menurut Rahardjo, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya, maka untuk menemukan sosok polisi Indonesia yang ideal harus memperhatikan masyarakatnya. Sebagai salah satu institusi tertua, perkembangan kepolisian dan ilmu kepolisian menghasilkan bermacam pemikiran-pemikiran tentang sistem kepolisian di dunia ini.

Muhammad (2005) menjelaskan bahwa sistem kepolisian pada awalnya mengacu pada dua model. Pertama adalah model Eropa Kontinental dan kedua adalah model *Anglo-Saxon*. Perkembangan kedua model tersebut tidak terlepas dari riwayat kelahiran lembaga kepolisian pada kedua belahan bumi tersebut, yaitu Eropa Kontinental (Daratan) dan Eropa *Anglo Saxon* (Kepulauan).

---

<sup>1</sup> Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Polri pada masa sekarang ini tidak hanya menghadapi permasalahan kejahatan kekerasan atau pencurian saja. Bentuk kejahatan sudah semakin berkembang, sehingga polisi pun harus ikut bergerak dinamis supaya dapat menangani kejahatan tersebut. Mustofa (2007) mendefinisikan kejahatan yang sesuai dengan kriminologi yang sosiologis sebagai:

- A. Pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu, ataupun sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) yang merugikan masyarakat (baik secara materi, fisik, maupun psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberi sanksi pidana.
- B. Pola tingkah laku individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang sudah “terkenal” sebagai daerah yang rawan dengan kejahatan, salah satunya adalah Kompleks Permata atau lebih dikenal dengan sebutan Kampung Ambon yang terletak di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Kompleks Permata mulai ramai saat perkampungan Ambon di sekitar Kwitang, Jakarta Pusat digusur oleh Pemerintah Kota sekitar tahun 60-an. Warga pada akhirnya banyak mengungsi ke daerah Kedaung, di tepi sungai Cengkareng Drain, Jakarta Barat (Saputra, 2009).

Praktik penjualan dan peredaran narkoba yang sudah berlangsung relatif lama tampaknya telah membentuk struktur relasi sosial yang mantap, sikap mental dan pandangan hidup, serta solidaritas sosial yang kuat di kalangan warga komunitas Kompleks Permata untuk saling menjaga dan melindungi, yang kemudian berkontribusi pada proses pelanggaran praktik penjualan dan pengedaran narkoba di kehidupan dan penghidupan mereka sehari-hari. (Badan Narkotika Nasional, *Penelitian Aksi dan Perencanaan Partisipatif*. 2010, hal 1)

Upaya penindakan dan pemberantasan praktik transaksi narkoba yang selama ini telah dilakukan oleh pihak penegak hukum di Kompleks Permata relatif tidak efektif karena tidak mendapat dukungan warga setempat. Gaya pemolisian oleh Polri yang menggunakan pendekatan *paramilitary policing* terlihat dalam Berita Kota pada Sabtu, 23 Mei 2009. Dalam berita tersebut terungkap polisi yang mengerahkan 200 orang personil petugas, melakukan razia terhadap tempat judi dan narkoba, namun hasilnya kurang

maksimal. Petugas hanya menyita sejumlah barang bukti berupa, dua sepeda motor, sebuah mobil, dan kartu remi. Bahkan untuk membangun pos polisi (pospol) yang bertujuan untuk melindungi warga Kompleks Permata, polisi harus mengerahkan tenaga ekstra. Badan Narkotika Kota (BNK) perlu mengajak polisi, satpol PP, TNI dan aparat birokrasi di lapangan. Jumlah petugas yang diturunkan mencapai ratusan. Petugas menggunakan 5 truk untuk memobilisasi kekuatan. Juga kendaraan dinas lapangan yang jumlahnya berderat memanjang sekitar 100 meter di pinggir jalan kali Cengkareng Drain (Kilas Berita, 2009). Pospol yang berfungsi juga sebagai posko antinarkoba ini diresmikan sekitar bulan September 2009 oleh Wali Kota Jakarta Barat (TempoInteraktif, 2009).

Pemolisian yang baik harus memperhatikan karakteristik dari komunitas yang terkait (Sherman, 1986). Dengan karakteristik yang unik dari Kampung Ambon, maka polisi harus mencari bentuk pemolisian yang ideal untuk diterapkan di wilayah tersebut. Menjadi tantangan tersendiri bagi polisi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah seperti Kompleks Permata.

Selama bertahun-tahun masalah sosial di Kompleks Permata tetap hadir dengan dinamikanya sendiri, sedangkan sudah bertahun-tahun pula polisi hadir di wilayah tersebut. Pembangunan Pospol di dalam Kompleks Permata menjadi momentum perubahan bagi gaya pemolisian yang dilakukan wilayah tersebut. Hal ini membuat kajian akan pemolisian pada rentang waktu sebelum dibangunnya pospol dan pasca pembangunan pospol menjadi menarik untuk dilakukan. Kajian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam pemolisian di wilayah tersebut. Permasalahan inilah yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemolisian di Kompleks Permata, Cengkareng, sebelum dan sesudah pembangunan pos polisi Permata. Dalam penjelasan mengenai pelaksanaan pemolisian yang dilakukan di Kompleks Permata tersebut mencakup berbagai kendala dan permasalahan yang dialami. Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama membahas mengenai pelaksanaan dan permasalahan pemolisian sebelum dan sesudah pembangunan pos polisi di Kompleks Permata, Cengkareng.

Soetjahjo (2001) dalam tesisnya yang berjudul *Polisi Dalam Penegakkan Hukum Perjudian Sabung Ayam (Kasus di Kampung Ambon)* membahas mengenai penegakkan hukum terhadap perjudian sabung ayam di Kompleks Permata, serta melihat penyimpangan yang terjadi dalam upaya penegakkan hukum tersebut. Penelitian Soetjahjo ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktek penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polsek Metro Cengkareng (sebagai satuan kepolisian yang bertanggung

jawab terhadap Kompleks Permata) terhadap perjudian sabung ayam di Kompleks Permata.

Pada penelitian Soetjahjo (2001), data yang didapatkan cukup lengkap, terutama dalam konteks data tentang kepolisian (dalam hal ini Polsek Cengkareng). Melimpahnya data tentang unit kepolisian yang diteliti membuat penelitian Soetjahjo ini menjadi salah satu referensi keputusan utama yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data mengenai pelaksanaan pemolisian dan permasalahannya pada rentang waktu sebelum pembangunan pospol di Kompleks Permata. Soetjahjo mampu mendapatkan data mengenai kondisi Polsek Cengkareng dengan cukup baik dikarenakan ia sendiri adalah anggota kepolisian yang sedang mengambil kuliah untuk jenjang S2. Sehingga, dalam mengakses data pada institusi kepolisian menjadi cukup mudah. Namun Soetjahjo juga menyadari bahwa posisinya yang demikian bisa saja menimbulkan bias, karena tidak semua peneliti akan mendapatkan kondisi seperti yang Soetjahjo alami, selain itu dalam pencarian data melalui wawancara dikhawatirkan ada keengganan dari subjek penelitian, terutama dari pihak kepolisian, sehingga dikhawatirkan adanya *underreporting* atau ada data yang ditutup-tutupi

Signifikansi tulisan Soetjahjo dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu sumber data mengenai pelaksanaan dan hambatan pemolisian yang terjadi pada rentang waktu sebelum pospol dibangun. Selain itu, pada tulisan Soetjahjo ini, peneliti mendapat tambahan data mengenai kondisi Kompleks Permata pada awal terbentuknya sampai rentang waktu tahun 2001.

Weisburd dan Eck (2004) dalam *What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?* melakukan kajian mengenai efektifitas polisi dalam mengurangi kejahatan, gangguan ketertiban, dan rasa takut akan kejahatan dalam konteks tipologi dari inovasi dalam praktek kepolisian. Tipologi tersebut berdasarkan pada 2 dimensi, yaitu:

1. *Diversity of approach* (keanekaragaman pendekatan)
2. *Level of focus* (tingkatan perhatian)

Mereka menemukan bukti yang makin mendukung bahwa dalam model pemolisian konvensional, rendah sekali ditemukannya dua hal diatas, sebaliknya pada temuan lain mendukung investasi berkala dalam inovasi kepolisian yang memanggil untuk fokus yang lebih besar dan mengikat upaya polisi dikombinasikan dengan perluasan dari alat polisi dalam penegakkan hukum yang sederhana. Pemolisian komunitas ditemukan dapat mengurangi rasa takut akan kejahatan, namun dalam penelitian ini tidak ditemukannya bukti yang konsisten bahwa pemolisian komunitas (ketika

diterapkan tanpa model *problem oriented policing*) mempengaruhi baik kejahatan atau gangguan ketertiban. Pengembangan bukti bahwa keefektifan dari *problem oriented policing* dalam mengurangi kejahatan, gangguan ketertiban dan ketakutan akan kejahatan. Dalam penelitian ini, ada temuan yang mengatakan bahwa dengan menggunakan model pemolisian konvensional dapat membawa petugas kepolisian menjadi lebih fokus pada bagaimana pemolisian itu dijalankan ketimbang apakah pemolisian itu mempunyai dampak pada keamanan publik.

Weisburd dan Eck (2004) membagi jadi 4 dimensi pemolisian, yaitu *standart model*, *community policing*, *hot spot policing*, dan *problem oriented policing* dalam mengorganisasikan temuan di penelitiannya. Setiap review pada tiap dimensi diatas, mereka memulainya dengan proposisi yang mereka temukan berdasarkan penelitian yang direviewnya.

Proposisi yang pertama adalah bahwa model standar pemolisian menyandarkan pada keseragaman ketentuan dari sumber daya polisi dan penegakkan hukum oleh polisi untuk pencegahan kejahatan dan gangguan keamanan dalam semua jenis kejahatan dan kewenangan polisi untuk melayani. Disamping itu banyak polisi yang menggunakan model ini, sedikit sekali temuan yang menyatakan bahwa model ini efektif dalam mengendalikan kejahatan dan gangguan ketertiban atau mengurangi ketakutan akan kejahatan. Strategi yang umum digunakan dalam model pemolisian ini adalah penambahan jumlah petugas polisi, patroli yang acak lintas komuniti, respon yang cepat dalam panggilan tugas, generalisasi dalam investigasi kejahatan, penegakkan dan penangkapan yang intensif.

Proposisi yang kedua adalah, pada dua dekade terakhir penelitian tentang pemolisian berfokus pada pembahasan polisi dan publik dalam pemolisian komuniti. Karena pemolisian komuniti melibatkan banyak taktik, hal ini menyebabkan sebagai strategi umum, pemolisian komuniti sulit untuk dievaluasi. Secara keseluruhan temuan tidak membuktikan bahwa pendekatan pemolisian komuniti mempunyai dampak yang signifikan dalam penanganan kejahatan dan gangguan ketertiban, yang lebih banyak ditemukan adalah bahwa taktik-taktik yang digunakan dalam pemolisian komuniti efektif untuk mengurangi rasa takut akan kejahatan.

Proposisi yang ketiga adalah bahwa adanya peningkatan ketertarikan dalam dua dekade terakhir akan pelaksanaan pemolisian yang berfokus pada tipe kejahatan yang spesifik dan tempat yang spesifik pula. Dalam kenyataannya, *hot spot policing* telah menjadi strategi umum polisi dalam menangani masalah keamanan publik. Sementara sedikit sekali temuan yang menyarankan pada pelaksanaan pemolisian yang spesifik pada pelaku kejahatan, justru temuan yang terkuat didapatkan adalah bahwa pemolisian

yang fokus pada pendekatan geografis pada masalah kejahatan dapat mengurangi kejahatan dan gangguan ketertiban.

Proporsisi yang keempat adalah *problem oriented policing* muncul pada tahun 1990an sebagai strategi pemolisian yang utama dalam menyelesaikan masalah kejahatan dan gangguan ketertiban. Dalam hal temuan tentang *problem oriented policing* adalah bahwa pendekatan ini efektif dalam mengurangi kejahatan, gangguan ketertiban dan rasa takut akan kejahatan.

Penelitian yang dilakukan Weisburd dan Eck (2004) memberikan pengetahuan mengenai penelitian yang membahas tentang upaya pemolisian dalam menangani kejahatan dan gangguan ketertiban serta mengurangi ketakutan akan kejahatan.

Darmawan (2007) dalam *Pemolisian Komunitas di Wilayah Polsek Metro Cakung – Jakarta Timur Dalam Perspektif Konsep dan Praktek* membahas pemolisian di Polsek Metro Cakung, Jakarta Timur. Penelitian tersebut memfokuskan pada konsep dasar dari pemolisian komuniti di sejumlah negara maju dan yang dianut pada pemolisian komuniti oleh Polri. Selain itu penelitian tersebut juga melihat praktek bagaimana pemolisian komunitas diimplementasikan oleh petugas kepolisian dalam membangun hubungan dengan warga melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM). Dalam penelitian ini Darmawan (2007) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengamatan lapangan untuk memahami corak pemolisian dan interaksi warga dalam pemolisian komuniti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengamatan lapangan untuk mengetahui corak pemolisian dan interaksi warga dalam pemolisian komunitas. Penelitian dilakukan di wilayah Polsek Cakung, Jakarta Timur.

Dermawan (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan, penerapan pemolisian komuniti memang diperlukan perhatian ekstra. Selain ada kendala eksternal berupa kepercayaan masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber daya dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenahan guna mendukung konsep ini. Kepercayaan dan rasa saling mempercayai menjadi kunci keberhasilan pemolisian komuniti. Model pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki masalah yang kompleks dalam penerapannya pada tingkat polsek di Indonesia.

Brunsons dan Miller (2006) dalam penelitiannya yang berjudul *Gender, Race and Urban Policing : The Experiance of African American Youth* meneliti tentang pemolisian yang dilakukan pada remaja Afrika-Amerika. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah bagaimana gender dan ras mempengaruhi pemolisian yang dilakukan. Strategi pemolisian yang proaktif

menghasilkan kerugian bagi komunitas miskin perkotaan dari ras Afrika-Amerika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan wawancara mendalam terhadap 75 remaja Afrika-Amerika yang tinggal di St. Louis, Missouri. Dari 75 remaja tersebut, 35 adalah remaja perempuan dan 40nya adalah remaja pria, usia mereka rata-rata adalah 12 sampai 19 tahun. Pada 16 dari 40 orang remaja pria dan 15 dari 35 remaja perempuan yang menjadi sampel penelitian ini dilaporkan terlibat dalam kenakalan yang serius. Kenakalan yang serius dalam hal ini adalah, mencuri lebih dari \$50, mencuri kendaraan bermotor, menyerang seseorang dengan senjata atau sampai menimbulkan luka serius, terlibat dalam perampokan, menjual ganja, kokain dan narkoba lainnya.

Penelitian ini akan memiliki peranan bagi peneliti dalam melihat respons polisi terkait dengan perbedaan gender dan ras tersebut. Hal yang sama peneliti temukan dalam wilayah Kompleks Permata, dimana mereka berasal dari etnis yang berbeda dengan petugas polisi, selain itu stigma yang melekat di wilayah tersebut juga akan mempengaruhi pemolisian yang dilakukan di Kompleks Permata.

Moore (1992) dalam tulisannya yang berjudul *Problem-Solving and Community Policing* menjelaskan bahwa *problem solving* dan *community policing* adalah konsep strategi yang mendefinisikan ulang tindakan dan arti dari pemolisian. *Problem solving policing* memfokuskan perhatian polisi pada permasalahan yang ada dalam sebuah kejadian/insiden, daripada insiden itu sendiri. *Community policing* menekankan pada pembentukan dari kerjasama antara polisi dan komunitas untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan. Tulisan ini mempelajari apa yang diketahui atau yang mungkin masuk akal untuk dirangkum tentang nilai dari *problem solving* dan *community policing*. Hal ini menjadi penting, pertama untuk mengerti apa arti dari konsep ini dan bagaimana konsep ini berperan dalam perubahan pada praktek pemolisian. Konsep ini baiknya di pahami bukan sebagai program baru atau pengaturan administratif tapi sebagai ide yang mengkaji ulang keseluruhan tujuan dan cara dari pemolisian. Dalam literatur bisnis manajemen, konsep ini dapat dikategorikan sebagai strategi organisasi. Kekuatan dan kelemahan konsep ini harus dipahami tidak hanya sebagai pencapaian dari tujuan operasional yang biasa dari kekuatan polisi untuk mengurangi kejahatan, namun untuk mengarahkan pengembangan dari departemen kepolisian dan memikat dukungan masyarakat serta legitimasi.

Saputra (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Pemolisian Pospol Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat* membahas mengenai pelaksanaan pemolisian yang dilakukan di Pospol Duri Kepa, Kebon Jeruk. Ruang lingkup dalam masalah penelitian ini mencakup situasi dan karakteristik

wilayah Pospol Duri Kepa, komposisi dan karakteristik wilayah Pospol Duri Kepa serta masalah sosial yang menonjol. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Dari tulisan ini peneliti mendapatkan beberapa temuan yang sama seperti yang peneliti dapatkan pada kajian kepustakaan lainnya, yaitu permasalahan dalam pelaksanaan pemolisian rata-rata terfokus pada kurangnya personel, prasarana dan anggaran (lihat Soetjahjo, 2001; Binsar, 2007, Darmawan 2007, dan Saputra, 2007).

Menarik untuk disimak bahwa menurut Weisburd dan Eck (2004) strategi yang umum digunakan dalam model pemolisian model tradisional adalah penambahan jumlah petugas polisi, patroli yang acak lintas komunitas, respon yang cepat dalam panggilan tugas, generalisasi dalam investigasi kejahatan, penegakkan dan penangkapan yang intensif. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa pendekatan pemolisian yang digunakan masih model pemolisian tradisional, karena strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerjanya lebih mengarah kepada strategi yang dilakukan pada model pemolisian tradisional.

Dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cole (1986) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi polisi terkait dengan tiga hal, yaitu:

1. *Order maintenance*, terkait dengan fungsinya dalam menjaga/mencegah perilaku yang mengganggu atau mengancam ketertiban umum atau melibatkan face to face conflict yang melibatkan dua orang atau lebih.
2. *Law enforcement*, terkait dengan fungsinya dalam mengontrol kejahatan dengan mengintervensi di dalam situasi dimana hukum telah dilanggar dan muncul pelanggar hukum yang harus di urus.
3. *Service*, terkait dengan fungsinya dalam menjadi asisten masyarakat, biasanya berkaitan dengan urusan yang cenderung tidak berkaitan dengan kejahatan.

Dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dijelaskan bahwa Policing dapat diartikan sebagai:



- a. perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/ teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya;
- b. pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi tentunya bukan tanpa masalah, ada berbagai hambatan yang mengakibatkan polisi menghadapi beberapa tantangan untuk menjalankan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pemolisian yang dilakukan tentunya sangat berpengaruh pada budaya kepolisian yang terbentuk selama ini. Reiner (2000) dalam Meliala (2006) mengungkapkan bahwa secara teoritik, kebudayaan kepolisian mengacu pada sejumlah pemahaman yang dikembangkan para polisi untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap tekanan dan ketegangan yang dihadapi kepolisian.

Polri tidak akan mampu mengatasi masalah keamanan dan ketertiban jika tetap menjadi polisi konvensional. Meliala (2005) mengungkapkan bahwa ciri pemolisian konvensional/tradisional:

- A. Senantiasa mengembangkan jarak antara polisi dan masyarakat. Jarak itu dipelihara dengan tujuan bermacam-macam: mulai dari pemeliharaan kewibawaan polisi sebagai simbol negara, agar polisi terlihat profesional sehingga upaya menjadikan esensi polisi sebagai penyedia dan pemelihara keamanan tetap terjaga.
- B. Mengembangkan anggapan bahwa polisi adalah pengemban kewenangan hukum yang profesional, spesialis, tidak sembarang orang yang bisa memperolehnya serta, oleh karenanya patut dihargai.
- C. Hanya hadir di masyarakat takkala diperlukan ketika kehadiran polisi tidak diperlukan lagi (kasus sudah selesai) maka polisi dapat kembali ke kantor.

Dalam Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, disebutkan bahwa pemolisian masyarakat adalah implementasi

pemolisian proaktif yang menekankan pada kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat (Pasal 1 ayat 8).

Dalam melihat pemolisian yang dilakukan di wilayah Kompleks Permata, peneliti membaginya dalam dua fase. Pertama adalah fase sebelum didirikannya Pospol dan fase kedua adalah setelah didirikannya Pospol di dalam lingkungan RW 07, Kompleks Permata.

Untuk memperbandingkan kedua fase tersebut, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan yang dimaksud disini adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertin dan tentram. Penjelasan indikator ini peneliti dapatkan dari Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2008.

2. Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*)

Pencegahan kejahatan menjadi indikator yang tegas dalam pemolisian modern dan tradisional. Dalam pemolisian tradisional lebih mengedepankan tindakan-tindakan represif, namun pada pemolisian modern tindakan pencegahan kejahatan menjadi salah satu ciri utama.

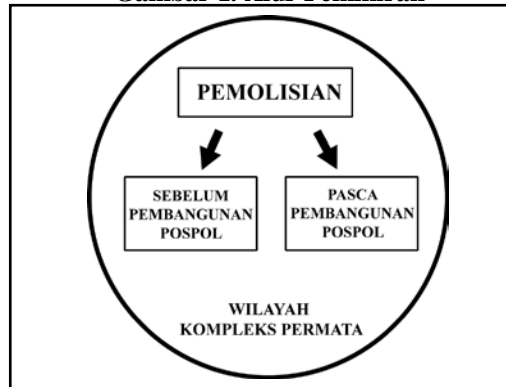
3. Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)

Pemecahan masalah adalah proses pendekatan permasalahan kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih. Tujuan peneliti menggunakan indikator-indikator diatas agar hasil perbandingan yang peneliti lakukan lebih terukur. Kemudian peneliti memilih indikator diatas karena indikator tersebut memang merupakan indikator dalam pemolisian masyarakat, dimana pemolisian masyarakat adalah *grand strategy* dalam mewujudkan Polri yang modern.

Melihat perbedaan pendekatan pemolisian yang diambil Polri pada masa sebelum dan sesudah pembangunan pospol, maka peneliti mencoba

membuat alur pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah :

**Gambar 1. Alur Pemikiran**



Gambar 1 menjelaskan pembagian temuan yang peneliti dapatkan dilapangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peneliti akan membagi menjadi dua fase, yaitu sebelum pembangunan Pospol dan pada setelah pembangunan Pospol. Rentang waktu yang digunakan pada tahap sebelum pembangunan Pospol adalah sekitar tahun 90an akhir (1998) sampai dengan 2008, karena pembangunan Pospol itu sendiri dilakukan pada Maret 2009. Kemudian untuk fase setelah pembangunan Pospol pada periode waktu 2009-sekarang.

### **Proses penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan kualitatif. Seperti yang dijelaskan Cresswell (1994) bahwa pendekatan penelitian mengacu pada cara peneliti melihat suatu gejala atau realitas sosial yang didasari pada asumsi dasar. Dalam pendekatan kualitatif, gejala sosial didefinisikan melalui hasil pemaknaan atau interpretasi. Dalam pendekatan kualitatif, gejala sosial didefinisikan melalui hasil pemaknaan atau interpretasi (Cresswell, 1994, hal.3-4). Pendekatan kualitatif ini diwujudkan dalam bentuk observasi terlibat dalam area penelitian, kemudian melakukan wawancara mendalam kepada informan yang terkait dengan tema penelitian ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti beranggapan bahwa pendekatan kualitatif dapat menggambarkan realitas yang ada dan pendekatan ini dinilai sangat peka karena dapat menangkap aspek dalam dunia sosial yang sulit ditangkap melalui angka (Neuman, 1997, hal 329).

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendefinisikan dan menjelaskan fenomena sosial (Bachman & Schut, 2003). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjawab “bagaimana” suatu fenomena terjadi (Bachman & Schut, 2003) memusatkan perhatian pada penemuan fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Selain memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemolisian di Kompleks Permata, penelitian ini berkeinginan dapat menjelaskan apa saja permasalahan yang dihadapi ketika pemolisian tersebut berlangsung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model *Before and After Design* (Bachman & Schut, 2003, hal 139) sebagai salah satu bentuk dari penelitian quasi eksperimental. Kondisi *before* adalah kondisi *pretreatment* yaitu sebelum pembangunan pospol, kemudian kondisi *post-treatment* adalah kondisi sesudah pembangunan pospol. Pembangunan pospol peneliti ambil sebagai titik tolak treatment untuk menentukan masa *before* dan *after*.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, antara lain:

#### **A. Observasi**

Observasi ini terbagi menjadi dua tahapan yaitu, tahap satu (1) adalah observasi lapangan yang peneliti lakukan bersamaan dengan kegiatan “Penelitian Aksi dan Perencanaan Partisipatif Untuk Membangun Komuniti Bebas Narkoba di Kompleks Permata, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat”<sup>2</sup> yang dilaksanakan pada 15 Juni 2009 – 11 Januari 2010. Tahap dua (2) adalah ketika peneliti melakukan kegiatan observasi lapangan sendiri, tahap ini berlangsung dilakukan setelah pelaksanaan observasi tahap pertama, bersamaan dengan kegiatan wawancara yang peneliti lakukan.

#### **B. Wawancara**

- **Aparat Kepolisian**

Dari aparat ada beberapa informan yang peneliti wawancarai, diantaranya adalah Kapolsek Cengkareng (Kompol Heri Dian Dwi Harto, SIK), mantan Kapolsek Cengkareng Periode 1998-2001 (AKBP Muhammad Fadhil Imran), mantan Kapolsek Cengkareng (Kompol Karimudin Ritonga) dan Kapolpos Kompleks Permata (AKP Holden Sirait S.H)

---

<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan *fieldnotes* yang peneliti tulis untuk Penelitian Aksi dari BNN bekerja sama dengan Dep. Antropologi dan Dep. Kriminologi FISIP-UI, sebelumnya peneliti sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada Dr. Iwan Tjitradjaja dan Prof Adrianus Meliala sebagai penanggung jawab penelitian aksi tersebut untuk menggunakan *fieldnotes* yang dimaksud dalam memperkaya data dipenelitian ini.

- Tokoh Masyarakat

Wawancara dengan tokoh masyarakat dilakukan untuk mengkonfirmasi data yang didapat dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian, selain itu untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi masyarakat baik sebelum pembangunan ataupun sesudah pembangunan pospol. Tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai adalah Ketua RW 07 (Bpk Johan), tokoh pemuda sekaligus Wakil RW 07 (Bpk Jimmy), Ketua RT 06 (Ibu Sendy).

### C. Studi literatur

Literatur didapatkan dari Perpustakaan Pusat UI, MBRC FISIP UI dan Pusat Kajian Kriminologi UI, Pengumpulan data melalui literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau profil singkat mengenai kepolisian dan gambaran awal mengenai Kompleks Permata.

Hambatan yang dialami peneliti adalah sulitnya mendapatkan data terkait dengan pemolisian di Kompleks Permata sebelum pembangunan pospol. Hal ini diakibatkan karena tidak langsung tersedianya data pada Polsek Cengkareng sebagai unit satuan yang bertanggung jawab pada Kompleks Permata pada masa itu, sehingga peneliti harus mengumpulkan serpihan-serpihan data yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan mozaik yang utuh.

## Pemolisian sebelum pembangunan pospol

### 1. Kondisi Kompleks Permata

Kompleks Permata sebetulnya adalah wilayah yang didirikan sebagai tempat tinggal warga korban gusur dari gedung Stovia (perumahan mantan anggota KNIL), Kwitang, Jakarta Pusat oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970-an. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua RW 07, Johan :

*“Awalnya Kompleks ini terbentuk karena pemindahan warga dari gedung Stovia. Mereka yang dipindahkan ke daerah ini dengan disediakan tanah dan bangunan gratis, yang sekarang adalah di RT 01-07. Kemudian Perusahaan Tanah dan Bangunan (PTB) DKI Jakarta juga membangun perum untuk warga DKI yang isinya bisa pensiunan, TNI, polisi, guru dan masyarakat umum. Nah sekarang itu jadi RT 08, 09, 10”.* (Sumber: wawancara dengan Johan. Selasa, 20 April 2010).

Berdasarkan penelitian Soetjahjo (2001) dijelaskan bahwa Jumlah warga Kompleks Permata ada lebih kurang sekitar 600 kepala keluarga yang terdiri dari berbagai etnis, memang yang terbanyak masih dari etnis Ambon,

yaitu sekitar 40%. Sebagaimana tinggal di RT 01, sisanya adalah campuran dari etnis lain, seperti; Jawa, Padang, Palembang, Batak dan dari Cina. (hal 63). Gambaran umum mengenai kondisi Kompleks Permata juga didapatkan dari penuturan Mantan Kapolsek periode 2008-2009, Karimudin Ritonga:

*“Komplek Permata biasa dikenal dengan kampung Ambon, wilayah ini mempunyai karakter khusus dalam kasus-kasus yang ada. Banyak orang berasumsi wilayah ini mengerikan dengan banyak preman berkeliaran dan tingkat kejahatan yang tinggi. Namun apabila kita berkunjung kesana maka akan terlihat bahwa Komplek Permata sama seperti wilayah perkotaan lain yang terdiri dari rumah-rumah masyarakat, dimana masing-masing melakukan aktivitas pada umumnya”. (Sumber: wawancara dengan Karimudin Ritonga. Rabu 16 November 2010).*

Kompleks Permata dan sekitarnya sebelum 2001 sering terjadi tindak kriminalitas terutama di dekat jembatan seperti penodongan, penjambretan, perampasan dan sebagainya (Soetjahjo, 2001). Gangguan ketertiban yang ada tidak hanya itu, di wilayah ini juga pernah terjadi tawuran antar warga yang cukup besar antara warga Kompleks Permata dengan kampung belakang. Kompleks Permata menjadi tempat yang identik dengan narkoba karena ada anggapan aman untuk membeli disana, karena polisi tidak berani menyentuh wilayah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Mantan Kapolsek Cengkareng periode 1998-2001, Fadhil Imran:

*“Waktu saya jadi kapolsek disana kasus narkotik, judi, pengeroyokan penganiayaan. Sebenarnya tingkat kejahatan disana, kita tidak boleh berbicara statistik kejahatan, tapi bagaimana mereka disana menjadi sarang narkoba disana. Bagaimana mereka menjadi titik merah bagi peredaran narkoba, bukan hanya Cengkareng, Jakarta Barat tapi ini orang se-Jakarta tahu. Karena identifikasi mereka, aman loh kalau beli ditempat gua. Dengan sistem yang mereka kembangkan itu, melawan, kadang-kadang mereka itu sadis, bawa ganja itu kedalam pakai mobil ambulans. Ya polisi juga nggak nyangka. Sampai pada taktik dan strategi mereka membawa narkoba kedalam itu sudah pada sampai seperti ini, memakai mobil ambulans, mana sangka kita itu mereka bawa narkoba, padahal itu mereka bawa ganja, shabu diselipin itu disitu. Ini waktu itu yah, nggak tahu sekarang”. (Sumber: wawancara dengan Fadhil Imran. Rabu 10 November 2010).*

Tindak kejahatan yang terjadi di Kompleks Permata cukup beragam, mulai dari tindak kejahatan kekerasan, judi sampai narkoba. Jika diamati lebih lanjut, maka kejahatan menonjol yang terjadi di Kompleks Permata dapat di kategorikan menjadi tiga (3) rentang waktu, yaitu;

- a) Tahun 90an awal, kejahatan yang dominan terjadi adalah kejahatan kekerasan, seperti pencurian, penjambratan, pemalakan, pengeroyokan dan beberapa bentuk kejahatan kekerasan lainnya.
- b) Tahun 90an akhir sampai tahun 2000 awal, kejahatan kekerasan mulai menurun, bahkan hampir tidak pernah terjadi didalam wilayah Kompleks Permata, diganti oleh maraknya perjudian. Awal mulanya adalah perjudian togel, kemudian berkembang menjadi bentuk judi lain seperti judi sabung ayam.
- c) Tahun 2001 – 2010, pada rentang waktu ini kejahatan yang dominan adalah kejahatan narkoba. Kejahatan kekerasan sudah menurun, jika terjadi bukan yang dominan, kemudian kejahatan judi juga sudah hilang, karena banyak bandar yang ditangkap. Selain itu memang polisi gencar melakukan penindakan terhadap kejahatan judi. Namun kejahatan bentuk lain masuk kedalam Kompleks Narkoba, yaitu kejahatan narkoba. Awalnya ganja menjadi komoditi utama didalam peredaran narkoba di kompleks Permata, namun belakangan (tahun 2007-2010) yang dominan beredar di Kompleks Permata adalah shabu dan putaw.

## 2. Polsek Metro Cengkareng

Polsek Metro Cengkareng memiliki jumlah personil sebanyak 87 orang atau hanya sekitar 64% dari DSPP (Daftar Susunan Personil dan Peralatan) yang seharusnya berjumlah 135 orang (Soetjahjo, 2001. hal 46). Berdasarkan data dari penelitian Soetjahjo didapatkan bahwa Polsek Cengkareng pada masa itu memiliki beberapa Unit, diantaranya adalah:

- Unit Resintel
- Unit Samapta Bhayangkara
- Unit Bimbingan Masyarakat

Pada penelitian Soetjahjo (2001) terungkap pula bahwa dalam menghadapi kasus perjudian sabung ayam di Kompleks Permata, Polsek Cengkareng lebih mengutamakan *peace maintenance* daripada *law enforcement*. Hal tersebut terlihat dari keputusan Kapolsek pada masa itu untuk tidak melakukan penggerebekan terhadap perjudian sabung ayam tersebut, meskipun sudah jelas melanggar undang-undang dengan pertimbangan seperti ini : pertama, Kapolsek masih mempelajari dampak yang akan ditimbulkan jika perjudian sabung ayam tersebut dibubarkan. Kedua, berdasarkan saran dari anggotanya apabila perjudian sabung ayam

tersebut dibubarkan, maka dikhawatirkan warga-warga yang terlibat dalam perjudian tersebut beralih profesi menjadi seperti semula, pelaku kriminal seperti jambret, pemeras, penodong, pengguna obat terlarang, dan sebagainya karena penghasilan mereka yang sebelumnya lumayan sebagai pengelola perjudian ayam tersebut akan berprofesi sebagai kriminal lagi (Soetjahjo, 2001. hal 101). Kemudian semenjak tahun 2005 keatas, pemolisian komuniti diterapkan diseluruh wilayah Indonesia, begitupula di Polsek Cengkareng, namun memang penerapannya bertahap. Pada tahun 2008-2009 kegiatan pemolisian komuniti di wilayah Cengkareng sudah ada.

Dalam pelaksanaan pemolisian di masa sebelum pembangunan Pospol Permata ada beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Hambatan pertama, adanya penyimpangan dari anggota kepolisian yang bertugas disana, hal ini peneliti dapatkan dari penelitian Soetjahjo (2001), didalam penelitiannya Soetjahjo mengungkapkan bahwa
- b. Hambatan kedua adalah situasi Kompleks Permata yang memang rawan kejahatan, hal ini diakibatkan kondisi sosial ekonomi yang terjadi pada tahun '98. Dimana kerusuhan yang terjadi mengakibatkan situsasi yang tidak kondusif. Selain itu tingginya angka pengangguran juga membuat tingkat kejahatan naik
- c. Hambatan ketiga adalah kurangnya dukungan dari masyarakat, pada masyarakat yang terlibat langsung dengan tindak kejahatan yang di Kompleks Permata tentu tidak ingin bekerja sama dengan pihak kepolisian karena akan merugikan mereka. Sulitnya membina hubungan dengan masyarakat terlihat dari penuturan mantan Kapolsek periode 1998-2001, Fadhil Imran; “Hambatan yang saya rasakan adalah kurangnya dukungan dari masyarakat“. Hambatan yang sama juga dirasakan oleh Mantan Kapolsek Cengkareng Periode 2008-2009, Karimudin Ritonga “Adanya beberapa oknum yang kurang bersahabat mengintimidasi kelompok lain agar tidak bekerjasama dengan Polsek Cengkareng.”
- d. Hambatan keempat adalah tidak ada dukungan serta kerjasama dari berbagai instansi pemerintahan terkait, seperti Pemda untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Kompleks Permata.

### **Pemolisian sebelum pembangunan pospol**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, maka wilayah Kompleks Permata dapat dibagi menjadi 3 kelompok wilayah besar. Pengelompokan ini peneliti lakukan berdasarkan kesamaan etnis warga yang bertempat tinggal disana, kesamaan sosial ekonomi dan dan beberapa pertimbangan lain, seperti misalnya interaksi sesama warganya, penerimaan



terhadap orang baru, keterlibatan dalam kegiatan narkoba. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Wilayah “Ambon”**

Wilayah “Ambon” terdiri dari RT 01-07 dan sebagian wilayah RT 15. Pada wilayah ini ciri yang paling mudah dikenali adalah banyaknya warga yang beretnis Ambon. Selain itu jika dilihat dari latar belakang historisnya, maka Kampung Ambon yang pertama kali terbentuk berada pada wilayah RT 01-07 ini.

Warga yang diluar RT 01-07 juga kerap menyebutnya sebagai Kampung Ambon, mereka mengidentifikasikan dirinya berbeda dengan warga yang berada di wilayah “Ambon” meskipun sebetulnya mereka masih dalam satu RW. Selain itu warga diluar wilayah ini juga lebih memilih untuk tidak berinteraksi dengan warga yang ada di dalam Kompleks.

Kondisi sosial-ekonomi di wilayah ini, terbilang berada di kelas menengah, bahkan ada terdapat beberapa rumah yang terlihat sebagai rumah mewah, hal tersebut dapat peneliti simpulkan dari kondisi bangunan yang dua lantai dan memiliki kendaraan pribadi. Namun jika dilihat rata-ratanya makan kelas sosial-ekonominya berada pada kelas menengah.

Salah satu yang menarik dari wilayah ini adalah interaksi sesama warganya. Karena berasal dari etnis yang sama, yaitu Ambon, interaksi warga di wilayah ini sangat dekat, karena memang selain berasal dari etnis yang sama beberapa di antara warga masih punya hubungan saudara. Peneliti dapat menyimpulkan interaksi antar warga dekat berdasarkan pengamatan peneliti akan kegiatan sehari-hari di wilayah ini, warga sering sekali duduk di depan rumahnya untuk sekadar berbincang dengan tetangganya, atau saling mengunjungi. Selain itu terlihat juga dari saling mengenalnya warga yang satu dan yang lainnya. Namun yang unik adalah untuk interaksi warga di wilayah ini dengan orang baru, terkesan sangat tertutup. Warga di wilayah ini sangat hati-hati dalam menerima orang baru, bahkan hampir terlihat seperti tidak mau menerima keberadaan orang baru.

- **Wilayah “Kompleks Batako”**

Wilayah Kompleks yang dimaksud adalah mulai dari RT 08, 10, 11, 12 dan sebagian wilayah RT 15. Warga di wilayah ini lebih suka mengidentifikasikan diri mereka sebagai warga Komplek Batako, sejarahnya adalah pada perkembangan Kompleks Permata, selain warga pindahan dari gedung Stovia, penghuni di Kompleks Permata adalah warga yang membeli dari perumahan DKI Jakarta, yang didirikan oleh Perusahaan Tanah Bangunan (PTB) DKI Jakarta.

Karena ketika pembangunannya wilayah “Kompleks Batako” rumah-rumah yang dibangun menggunakan batako, tidak seperti yang diberikan ke warga pindahan dari gedung Stovia, yang berupa bedeng/triplek kayu. Warga yang berada di wilayah ini cukup beragam dari segi etnis, tidak seperti wilayah “Ambon” yang didominasi dari etnis Ambon. Kebanyakan warga yang berada di wilayah ini berasal dari etnis Tionghoa, selain itu banyak juga yang berasal dari etnis Jawa. Untuk tingkat sosial-ekonomi pada warga di wilayah ini termasuk ke dalam kelas menengah keatas. Cukup banyak warga yang memiliki rumah yang besar, lengkap dengan mobil pribadinya. Warga di wilayah ini kebanyakan berprofesi sebagai karyawan swasta dan pedagang.

### • Wilayah “Kampung”

Wilayah kampung yang dimaksud adalah sisa dari RT yang ada di RW 07, yaitu RT 09, RT 13, RT 14, dan RT 16. Wilayah ini sebetulnya adalah hasil dari pemekaran wilayah RW 07. Warga di wilayah ini lebih banyak berasal dari perantau, kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat, namun masih ada juga beberapa warga penduduk asli Jakarta.

Mayoritas warga di wilayah ini beragama Islam. Organisasi kedaerahan seperti Front Betawi Rembug (FBR) juga aktif di wilayah ini. Para pemudanya banyak terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, ziarah makam para wali dan beberapa kegiatan lainnya.

Kondisi sosial-ekonomi di wilayah ini tergolong rendah, bahkan bisa dikatakan sebagai daerah kumuh. Terdapat banyak kontrakan dan kost-kostan murah yang disewa oleh karyawan pabrik dan pedagang keliling. Di wilayah ini sangat padat sekali, rumahnya saling berdempetan, dan kadang hanya dibatasi triplek saja. RT 14 dan RT 16 sempat menjadi korban pelebaran saluran kali yang ada di depan rumah mereka, akibatnya rumah warga terpaksa “mundur” beberapa meter dari posisi semula.

Interaksi sesama warga terbilang dekat, hal ini terlihat ketika salah satu warga mengadakan acara seperti acara pernikahan misalnya, maka warga lainnya terlibat aktif. Selain itu sesama warga saling mengenal cukup baik. Penerimaan terhadap orang baru juga sangat baik. Peneliti menemukannya pada saat peneliti berkunjung ke rumah ketua RT 16 yang berada di wilayah ini. Beliau dengan ramah bercerita tentang banyak hal, mulai dari yang terkait dengan Kompleks Permata sampai bercerita tentang kehidupan pribadinya.

Secara umum wilayah Kompleks Permata cukup aman dari tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan jenis kejahatan *street crime* lainnya. Untuk kejahatan seperti pencurian, kecenderungan warga Kompleks Permata kompak untuk mengatasinya, maksudnya jika ada kejadian pasti

semua turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun jika sudah berurusan dengan narkoba, kebanyakan warga memilih diam saja, tidak mau ikut campur atau mencegah hal tersebut terjadi. Kasus kehilangan yang terjadi di Kompleks Permata juga pernah terjadi, namun bukan sebagai kasus yang menonjol. Kompleks Permata kini identik dengan narkoba, perdagangan narkoba terjadi cukup intens disana. Narkoba sendiri sudah mulai masuk kedalam Kompleks Permata sekitar tahun 90an akhir, namun baru marak dan menjadi terkenal itu semenjak tahun 2002. Sulitnya mengatasi perdagangan narkoba di wilayah Kompleks Permata juga dikarenakan masyarakatnya lebih memilih untuk tidak ikut campur terkait hal tersebut, selain itu ada beberapa warga juga yang menikmati keuntungan dari perdagangan narkoba tersebut secara tidak langsung.

Pemolisian yang dilakukan di Kompleks Permata menjadikan pospol sebagai ujung tombak dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam menjalankan pemolisian yang modern harus tercipta kerjasama dengan masyarakat juga. Secara spesifik tidak ada program pemolisian khusus yang dijalankan di Kompleks Permata. Koordinasi serta kerjasama yang terjadi baru sebatas petugas dengan para ketua RT dan RW, itupun tidak semua RT yang aktif berkoordinasi dengan petugas kepolisian. Untuk berinteraksi dengan warga di wilayah Ambon, memang cukup sulit. Hal tersebut juga disebabkan karena ketakutan warga jika terlihat berinteraksi dengan polisi. Masyarakat pada umumnya lebih hati-hati dalam berinteraksi dengan polisi, karena alasan yang diungkapkan diatas. Namun bagi tokoh masyarakat tidak terlalu bermasalah dalam membina hubungan dengan polisi. Kegiatan pemolisian yang dilakukan di Pospol Permata, terutama kegiatan patroli dianggap masih kurang dilakukan oleh anggota kepolisian yang bertugas disana.

Dengan adanya Pospol ditengah-tengah lingkungan Kompleks Permata, diharapkan dapat mengurangi kegiatan terkait dengan narkoba di daerah tersebut. Pembangunan pospol ditengah-tengah masyarakat menjadi momentum dimana pelaksanaan pemolisian komuniti bisa benar-benar berjalan, karena polisi sudah berada ditengah-tengah masyarakat.

## **Pembahasan**

Pembahasan lebih lanjutnya akan peneliti lakukan sesuai dengan indikator:

### **1. Kemitraan (*Partnership*)**

Kemitraan yang dimaksud disini adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya

demikian tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram. Penjelasan indikator ini peneliti dapatkan dari Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2008. Pada masa sebelum pembangunan Pospol, tidak terlihat adanya kemitraan antara polisi dengan masyarakat. Memang betul ada interaksi antara polisi dengan masyarakat, namun interaksi yang terjadi terbilang kurang dalam. Pasca pembangunan pospol, pendekatan pemolisian yang digunakan sudah memakai pemolisian komunitas. Dalam rentang waktu ini kemitraan mutlak menjadi syarat utama agar pemolisian dengan pendekatan ini dapat berjalan. Namun dari temuan data yang sudah diungkapkan pada bagian sebelumnya, kemitraan antara masyarakat dengan polisi masih belum terlihat.

Pasca pembangunan Pospol Permata, kegiatan siskamling sebagai bentuk patroli yang dilakukan oleh warga juga belum terlihat. Ada beberapa RT yang melakukan kegiatan siskamling, namun RT tersebut adalah RT yang berada diluar wilayah "Ambon". Padahal wilayah "Ambon" justru adalah wilayah yang teridentifikasi sebagai pusat kegiatan perdagangan narkoba. Dengan demikian terlihat bahwa sebelum dan sesudah pembangunan pospol tidak terdapat kemitraan dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan, gangguan keamanan. Warga dan polisi tidak berjalan bersama untuk mengatasi masalah kejahatan dan gangguan sosial yang ada di wilayahnya. Polisi harusnya lebih proaktif dalam hal ini, dengan kondisi khusus yang dimiliki oleh kompleks memang akan sulit untuk menumbuhkan kemitraan antara polisi dengan masyarakat, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran atas ketiadaannya kemitraan antara polisi dan masyarakat.

## **2. Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*)**

Pencegahan kejahatan menjadi indikator yang tegas dalam pemolisian modern dan tradisional. Dalam pemolisian tradisional lebih mengedepankan tindakan-tindakan represif, namun pada pemolisian modern tindakan pencegahan kejahatan menjadi salah satu ciri utama.

Tindakan pencegahan kejahatan dapat berbentuk seperti deteksi dini dari pihak kepolisian akan gejala-gejala yang mungkin menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta dapat memancing terjadinya kejahatan. Selain itu polisi bisa juga bekerjasama dengan warga untuk melakukan pertemuan atau menggelar diskusi dalam rangka menyadarkan warga untuk tidak berbuat kejahatan, kegiatan tersebut termasuk upaya pencegahan kejahatan.

Tindakan represif yang diambil Polri pada masa itu karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan pencegahan, kondisi krisis dan kerusuhan Mei '98 yang turut menyumbang

kondisi yang tidak kondusif dalam penegakkan hukum. Akan sulit untuk melakukan tindakan pencegahan kejahatan jika berada dalam situasi yang demikian. Kegiatan deteksi dini akan gejala gangguan keamanan dan ketertiban memang sudah dilakukan, akan tetapi kegiatan yang melibatkan warga dalam upaya pencegahan kejahatan masih belum muncul. Hal tersebut dikarenakan kesadaran warga yang terbilang rendah.

### **3. Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)**

Pemecahan masalah adalah proses pendekatan permasalahan kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih. Pada masa sebelum pembangunan pospol kegiatan pemolisian yang mengutamakan pada pemecahan masalah belum terlihat. Kegiatan pemolisian yang ada dilakukan hanya sebatas pada penindakan terhadap kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi. Tidak adanya upaya pemecahan masalah terlihat dari berlangsungnya kegiatan judi sabung ayam hingga cukup lama.

### **Kesimpulan dan Saran**

Pemolisian yang dilakukan pada masa sebelum dan sesudah pembangunan pospol tidak mengalami perbedaan yang berarti. Seharusnya pemolisian yang diterapkan di Kompleks Permata mengalami perbedaan pada masa sebelum dan sesudah pembangunan pospol. Karena adanya perubahan gaya pemolisian yang ada di Indonesia, selain itu perbedaan tersebut juga seharusnya terjadi karena dibangunnya Pospol Permata. Dengan dibangunnya Pospol Permata Polisi diharapkan dapat memecahkan masalah peredaran narkoba yang ada disana.

Dengan karakteristik warganya yang khusus membuat pemolisian yang dilakukan disana harus khusus pula. Sejarah panjang Kompleks Permata sebagai daerah yang rawan kejahatan membuat polisi dan masyarakat umum memiliki persepsi negatif terhadap warga yang ada disana. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemolisian di Kompleks Permata salah satunya adalah kurangnya dukungan dari warga masyarakat. Hal terjadi berulang-ulang di masa sebelum dan sesudah pembangunan pospol. Pada fase sebelum pembangunan dan sesudah pembangunan pospol, tidak nampak dukungan dari warga untuk bersama-sama memberantas perdagangan narkoba di wilayah Kompleks Permata.

Saran terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan pemolisian di Kompleks Permata, terutama terkait dengan kurangnya dukungan dari warga masyarakat, yang terjadi berulang-ulang di masa sebelum dan sesudah pembangunan pospol adalah perlu diadakannya kegiatan pembinaan terhadap warga masyarakat agar tercipta kesadaran pada warga masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada di Kompleks Permata. Kegiatan penyadaran tersebut harus berupa program yang berkelanjutan dan tepat sasaran, karena selama ini sudah sering ada penyuluhan atau diskusi mengenai masalah yang ada di Kompleks Permata, namun tidak berkelanjutan. Warga seperti hanya mendapatkan “angin segar” dari pemerintah untuk mengatasi masalah di Kompleks Permata, namun seringkali janji-janji tersebut tidak ada kelanjutannya. Selain itu penyuluhan tentang penyadaran narkoba misalnya, diikuti oleh warga yang tidak terlibat langsung terkait dengan perdagangan narkoba tersebut.

Program berkelanjutan yang dibutuhkan oleh Kompleks Permata harus mendapatkan sosialisasi yang cukup kepada stakeholder terkait. Jangan sampai tidak adanya koordinasi antar lembaga yang dapat menyebabkan program tersebut tidak berjalan. Selain sosialisasi terhadap program tersebut, harus diadakan pula evaluasi atas pelaksanaannya. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui efektifitas program yang dijalankan, apakah menimbulkan dampak yang positif atau malah negatif.

Ketiadaan kerjasama antar instansi pemerintah harus mendapatkan perhatian serius, karena jika tidak ada kerjasama antar instansi pemerintah bagaimana bisa terwujud program yang efektif dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di Kompleks Permata.

Kemudian polisi harus segera membina kemitraan dengan masyarakat di Kompleks Permata, memang akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan dari warga terhadap institusi kepolisian, mengingat ada penyimpangan anggota yang terjadi. Begitupula sebaliknya, polisi juga akan sulit menumbuhkan kepercayaannya terhadap warga di Kompleks Permata karena sudah tertanam persepsi yang negatif terhadap warga di Kompleks Permata. Namun dengan usaha yang keras dari semua pihak, kerjasama tersebut akan terwujud.

Kemudian saran peneliti terkait dengan kajian teoritik tentang pemolisian adalah perlu dilakukannya penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan pemolisian yang diterapkan pada daerah yang memiliki kekhususan seperti Kompleks Permata. Kajian tersebut menjadi penting karena wilayah yang memiliki karakter seperti Kompleks Permata, yaitu menjadi tempat yang identik sebagai daerah rawan kejahatan dan warganya terlibat dalam tindak kejahatan, tidak hanya

Kompleks Permata semata. Masih ada banyak daerah lain di Indonesia yang memiliki kondisi yang mirip dengan Kompleks Permata.

Mengatasi permasalahan di Kompleks Permata tentunya tidak hanya akan berdampak pada masa ini saja, namun akan terasa juga dampaknya sampai beberapa generasi kedepan. Jika berhasil mengatasi permasalahan peredaran narkoba di Kompleks Permata, maka kita sudah menyelamatkan beberapa generasi didepan dari bahaya narkoba.

## Daftar Pustaka

- Bachman, Ronet., & Schut, Russel.K. (2003). **The Practice of Research in Criminology and Criminal Justice (2nd Ed.)**. California: Sage Publication.Inc.
- Brantingham, Paul J., & Brantingham, Patricia L. (1984). **Patterns in Crime**. New York: MacMillan Publishing Company.
- Cole, George F. (1986). **Criminal Justice In America (4th Ed.)**. California: Brooks/Cole Publishing Co.
- Cresswell, John W. (1994). **Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches**. USA: Sage Publications, Inc.
- Djain, Awaloedin et al. (2006), **Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari Jaman Kuno Sampai Sekarang**. Jakarta : Yayasan Brata Bhakti.
- Dwi Laksana, Chrysanda. (2009). **Polisi Penjaga Kehidupan**. Jakarta : YPKIK.
- Meliala, Adrianus. (1996). **Mengupas Insensitivitas Polisi**. Dalam Meliala, Adrianus (Ed). Quo Vadis Polisi. (hal 25-34). Depok : Jurusan Kriminologi dan Majalah Forum Keadilan.
- , (2005). **Mungkinkah Mewujudkan Polisi yang Bersih?**. Jakarta: Partnership.
- Muhammad, Farouk. (2005). **Menuju Reformasi Polri**. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Mustofa, Muhammad. (2007a). **Kriminologi**. Depok: FISIP UI Press.
- , (2007b). **Metodologi Penelitian Kriminologi, (2nd Ed.)**. Depok: FISIP UI Press,
- Neuman, Lawrence. (1997). **Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches**. Boston: Allyn and Bacon.
- Parker, Craig L, Jr. (1998). **The Japanese Police System Today: An American Perspective** (Kunarto dan Hariyadi Kuswaryono, Penerjemah). Jakarta: Cipta Manunggal.

- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, (2010), **Polri Mengisi Republik**. Jakarta: PTIK Press.
- \_\_\_\_\_, (2009). **Ringkasan Koban dan Chuzaisho**. Jakarta: PTIK Press dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
- Rianto, Bibit S. (2006). **Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Masyarakat**. Jakarta : PTIK Press.
- Santoso, Topo., & Zulfa, Eva Achjani. (2005). **Kriminologi**. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Tabah, Anton. (2002). **Membangun Polri yang Kuat: Belajar dari Macan-Macan Asia**. Jakarta : Mitra Hardhasuma.
- Binsar, Tony. (2007). **Penanganan Pospol Pulomas Terhadap Pengemis di Persimpangan Coca-Cola**. Tesis. Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia
- Dermawan, Mohammad Kemal. (2007). **Pemolisian Komunitas di Wilayah Polsek Metro Cakung**. Tesis. Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia
- \_\_\_\_\_, (2009). **Potensi Pemolisian Komunitas pada Masyarakat Perkotaan : Suatu Kajian dari Aspek Kapasitas Komunitas, Prinsip-prinsip Demokrasi, dan Pengawasan Sipil**. Disertasi. Program Studi Sosiologi FISIP UI.
- Hermanto, Andries. (2005). **Pelaksanaan Tugas Pokok dan Tugas-tugas Polri pada Pospol (Studi kasus di Polsek Metro Gambir – Polres Metro Jakarta Pusat-Polda Metro Jakarta Raya)**. Tesis. Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia
- Saputra, Imam. (2007). **Pemolisian Pospol Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat**. Tesis. Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia
- Soetjahjo, Bambang. (2001). **Polisi Dalam Penegakkan Hukum Perjudian Sabung Ayam (Kasus di Kampung Ambon)**. Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kepolisian- UI.
- Bayley, David H., & Shearing, Clifford D. (1996). **The Future of Policing**. *Law & Society Review*, Vol. 30, No. 3. Law and Society Association. [online]  
<http://links.jstor.org/sici?sici=00239216%281996%2930%3A3%3C585%3ATFOP%3E2.0.CO%3B2-2>
- Braga, Anthony A. (2001). **The Effects of Hot Spots Policing on Crime**. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 578, What Works in Preventing Crime? Systematic Reviews of Experimental and Quasi-Experimental Research. Sage Publications,



- Inc. dan The American Academy of Political and Social Science. [online] <http://www.jstor.org/stable/1049870>
- Brunsons, Rod K., dan Miller, Jody (2006). **Gender, Race, and Urban Policing: The Experience of African American Youths.** *Gender and Society*, Vol. 20, No. 4 . Sage Publications, Inc. [online] <http://www.jstor.org/stable/27640908>
- Fagan, Jeffrey. (2002). **Policing Guns and Youth Violence.** *The Future of Children*, Vol. 12, No. 2, Children, Youth, and Gun Violence. Princeton University. [online] <http://www.jstor.org/stable/1602743>
- Meliala, Adrianus. 2006. **Beberapa Masalah Substansial Terkait Polmas.** *Jurnal Polisi Indonesia* Edisi VIII/Mei 2006, Jakarta: Program Pascasarjana KIK-UI.
- Moore, Mark Harisson. (1992). **Problem-Solving and Community Policing.** *Crime and Justice*, Vol. 15, Modern Policing. The University of Chicago Press. [online] <http://www.jstor.org/stable/1147618>
- Nahak, Herry Rudolf. (2002). **Pecalang, Model Local Policing di Bali.** *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No.II Juli 2002. Jurusan Kriminologi FISIP-UI.
- Sherman, Lawrence W., 1986, **Policing Community: What Works?** *Crime and Justice* Vol. 8, Communities and Crime. [online] <http://www.jstor.org/stable/1147432>
- Suparlan, Parsudi. 2006. **Polisi Sipil dan Pemolisian Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia.** *Jurnal Polisi Indonesia* Edisi VIII/Mei 2006, Jakarta: Program Pascasarjana KIK-UI .
- , 2008. **Penerapan Polmas Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia.** *Jurnal Polisi Indonesia* Edisi XI/April 2008, Jakarta: Program Pascasarjana KIK-UI.
- Thacher, David. (2001). **Conflicting Values in Community Policing.** *Law & Society Review*, Vol. 35, No. 4. Blackwell Publishing dan Law and Society Association. [online] <http://www.jstor.org/stable/3185416>
- Weisburd, David dan Eck, John E. (2004). **What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear.** *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 593, To Better Serve and Protect: Improving Police Practices. Sage Publications, Inc. dan American Academy of Political and Social Science. [online] <http://www.jstor.org/stable/4127666>
- BNN, (2010). **Penelitian Aksi dan Perencanaan Partisipatif Untuk Membangun Komuniti Bebas Narkoba d Kompleks Permata, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat.** Badan

- Narkotika Nasional bekerjasama dengan Dep. Antropologi dan Dep. Kriminologi FISIP-UI.
- PTIK, (2010). **Contoh-Contoh Forum Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai ‘Best Practice**. Hasil penelitian FKPM, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
- UU No. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Berita Kota, **“Kampung Ambon Kembali ‘Diobrak-abrik’ Polisi”**. 2009. [online] <http://www.beritakota.co.id/berita/politik-a-hukum/5734-kampung-ambon-kembali-diobrak-abrik-polisi->
- Detik.com, **“Mulai 2009, Setiap Desa Diisi Polmas”**. 2009. [online] <http://www.detiknews.com/read/2006/02/28/231656/549573/10/mulai-2009-setiap-desa-diisi-polmas>
- Kilas Berita, **“Sekilas Wajah Kampung Ambon”**. 2009. [online] <http://www.kilasberita.com/kb-news/kilas-indonesia/16528-sekilas-wajah-kampung-ambon>
- Liputanenam.com, **“Razia Narkoba di Kampung Ambon diduga Bocor”**. 2008. [online] <http://buser.liputan6.com/berita/200806/161493/Razia.Narkoba.di.Kampung.Ambon.Diduga.Bocor>
- Pos Kota, **“500 Petugas Serbu Markas Narkoba”**. 2005. [online] [http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=453&mn=6&smn=a](http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=453&mn=6&smn=a)
- Detik.com, **“Kisah tentang Kampung Ambon”**. 2009. [online] <http://www.detiknews.com/read/2009/03/02/145515/1092891/10/kisah-tentang-kampung-ambon>
- Tempointeraktif, **“Warga Kampung Ambon Tolak Pembangunan Posko Narkoba”**. 2009 [online] [http://www.tempointeraktif.com/hg/tata\\_kota/2009/03/02/brk,20090302-162679.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/tata_kota/2009/03/02/brk,20090302-162679.id.html).
- Wawancara dengan Dwi Harto, Heri Dian. (2010, Maret 31).
- Wawancara dengan Imran, Fadhil. (2010, November 10)
- Wawancara dengan Jimmy. (2010, April 19).
- Wawancara dengan Johan. (2010, April 21).
- Wawancara dengan Ritonga, Karimudin (2010, November 12).
- Wawancara dengan Sendy. (2010, April 19).
- Wawancara dengan Sirait, Holden. (2010, Maret 31).